SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL

DI INDONESIA

Perihal : Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dikelompokkan berdasarkan Modal Inti, yang selanjutnya disebut Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Pengelompokan Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha dimaksud terdiri dari 4 (empat) BUKU. Semakin tinggi Modal Inti Bank, semakin tinggi BUKU Bank dan semakin luas cakupan Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank.
- B. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank Umum dilakukan dengan menerbitkan produk maupun melaksanakan aktivitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
- C. Dalam menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas, Bank perlu memiliki modal yang cukup untuk mendukung penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitasnya, serta menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh produk atau aktivitas tersebut.

II. KEGIATAN USAHA BANK UMUM

A. Kegiatan Usaha Bank Umum

1. Kegiatan Usaha Bank Umum meliputi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Produk Bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.

Aktivitas adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah.

2. Kegiatan ...

2. Kegiatan Usaha Bank yang meliputi produk atau aktivitas dikelompokkan sebagai berikut:

a. Penghimpunan dana

Produk atau aktivitas penghimpunan dana berupa:

- 1) giro, tabungan atau deposito;
- 2) penerbitan sertifikat deposito;
- 3) pinjaman yang diterima;
- 4) penerbitan surat utang termasuk surat utang dengan fitur ekuitas;
- 5) sekuritisasi aset; dan
- 6) produk atau aktivitas penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penyaluran dana

Produk atau aktivitas penyaluran dana berupa:

- 1) kredit termasuk kredit sindikasi;
- 2) anjak piutang;
- 3) pembelian surat berharga berupa surat berharga korporasi, Surat Berharga Negara (SBN) atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- 4) penempatan pada Bank Indonesia;
- 5) penempatan pada Bank lain;
- 6) penerbitan bank garansi; dan
- 7) produk atau aktivitas penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pembiayaan perdagangan (*trade finance*)

Aktivitas pembiayaan perdagangan berupa:

- 1) pembiayaan ...

- 1) pembiayaan transaksi dalam negeri dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
- 2) pembiayaan ekspor impor dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)*;
- 3) pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan *Letter of Credit (L/C)*; dan
- 4) jasa atau layanan pembiayaan perdagangan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank Umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kegiatan *treasury*

Kegiatan *treasury* berupa:

- 1) jual beli Uang Kertas Asing (*Bank Notes*);
- 2) transaksi tunai valuta asing berupa transaksi *tom*, *tom* dan *spot*;
- 3) transaksi derivatif yang bersifat *plain vanilla*, antara lain *forward*, *swap*, atau *option* dengan fitur, karakteristik dan *underlying asset* yang tergolong sederhana;
- 4) transaksi derivatif kompleks, antara lain transaksi *forward*, *swap*, atau *option* yang bersifat kompleks, *structured products* dan *credit derivative*; dan
- 5) transaksi valuta asing dan derivatif lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Kegiatan keagenan dan kerjasama

Aktivitas keagenan dan kerjasama berupa:

- 1) agen ...

- 1) agen penjual Reksadana;
 - 2) agen penjual Surat Berharga Negara (SBN);
 - 3) *Bancassurance* model bisnis referensi, distribusi dan integrasi;
 - 4) *Payment point*; dan
 - 5) aktivitas keagenan atau kerjasama lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*
Produk atau aktivitas sistem pembayaran dan *electronic banking* berupa:
- 1) penyelenggara kliring;
 - 2) penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (*settlement*);
 - 3) penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu;
 - 4) penyelenggara uang elektronik (*e-money*);
 - 5) *Phone Banking*;
 - 6) *SMS Banking*;
 - 7) *Mobile Banking*;
 - 8) *Internet Banking*; dan
 - 9) produk atau aktivitas sistem pembayaran dan *electronic banking* lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Jasa atau layanan lain
Jasa atau layanan lain berupa:

1) penyediaan ...

- 1) penyediaan *safe deposit box*;
 - 2) pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*);
 - 3) pengelolaan kas (*cash management*);
 - 4) Layanan Nasabah Prima (LNP);
 - 5) kustodian;
 - 6) wali amanat;
 - 7) penitipan dengan pengelolaan (*trust*); dan
 - 8) jasa atau layanan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bank yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam valuta asing wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan dalam valuta asing.
4. Selain dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bank dapat melakukan:
- a. kegiatan penyertaan modal
Kegiatan berupa penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) yang bersifat *mandatory* atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
 - b. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit
Kegiatan berupa penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit

(debt ...

(*debt to equity swap*) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyertaan modal Bank Umum.

5. Definisi atau karakteristik umum produk atau aktivitas sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu pada Lampiran I.

B. Cakupan Kegiatan Usaha Bank Umum menurut BUKU

1. Cakupan Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan Bank pada masing-masing BUKU sebagai berikut:

- a. BUKU 1

BUKU 1 dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam Rupiah berupa kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana berupa produk atau aktivitas dasar, kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), kegiatan keagenan dan kerjasama dengan cakupan terbatas, kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas dan penyediaan jasa atau layanan lainnya. Bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit dan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).

- b. BUKU 2

BUKU 2 dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing yang meliputi kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana dengan cakupan yang lebih luas, kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), kegiatan *treasury* secara terbatas, kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan lebih luas,

kegiatan ...

kegiatan keagenan dan kerjasama dengan cakupan lebih luas dan penyediaan jasa atau layanan lainnya. Bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit.

c. BUKU 3

BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Bank juga dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia.

d. BUKU 4

BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Bank juga dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3 di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri.

2. Cakupan Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank sesuai dengan BUKU mengacu pada Lampiran II.

III. PENERBITAN PRODUK ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BANK UMUM

A. Ketentuan Umum

Bank dapat menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2 dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. merupakan produk atau aktivitas yang diperkenankan pada masing-masing BUKU;

2. rencana ...

2. rencana penerbitan produk yang belum pernah diterbitkan atau aktivitas yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank untuk tahun yang sama dengan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tersebut;
3. penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas yang merupakan produk atau aktivitas dasar tidak memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia;
4. penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru yang bukan merupakan produk atau aktivitas dasar dan/atau memiliki risiko serta kompleksitas tinggi, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia; dan
5. menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.

Rincian mengenai produk atau aktivitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 3, dan angka 4 mengacu pada Lampiran II.

B. Produk atau Aktivitas Baru

1. Produk atau aktivitas baru merupakan produk atau aktivitas Bank yang memenuhi kriteria berikut:
 - a. tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank; atau

merupakan ...

merupakan pengembangan, kombinasi atau variasi dari produk atau aktivitas yang telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank yang menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko produk atau aktivitas yang telah diterbitkan sebelumnya. Pengembangan yang menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko produk atau aktivitas yang telah diterbitkan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

- 1) pengembangan, kombinasi atau variasi dari produk yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Bank misalnya:
 - a) penerbitan surat utang dengan fitur yang berbeda dari surat utang sebelumnya misalnya penerbitan surat utang dengan fitur opsi konversi menjadi saham; atau
 - b) penerbitan *structured product* dengan struktur, fitur, karakteristik, imbal hasil, jangka waktu dan/atau *underlying asset* yang berbeda dengan produk sebelumnya;
 - 2) pengembangan dari aktivitas kerjasama yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Bank, misalnya aktivitas *bancassurance* model bisnis referensi dikembangkan menjadi model bisnis distribusi atau integrasi sehingga mengakibatkan perubahan pada profil risiko aktivitas tersebut.
2. Produk atau aktivitas baru yang tidak memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 antara lain meliputi:

a. penerbitan ...

- a. penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas dasar, berupa:
 - 1) penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito dan pinjaman yang diterima;
 - 2) penyaluran dana dalam bentuk kredit, pembelian surat berharga, penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank lain; dan
 - 3) *trade finance*, transaksi derivatif *plain vanilla* dan aktivitas pemindahan dana (*transfer*);
 - b. pengembangan dari produk atau aktivitas dasar yang pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank;
 - c. aktivitas penjualan produk yang diterbitkan oleh Pemerintah, misalnya aktivitas agen penjual Surat Berharga Negara (SBN);
 - d. penanaman dana dalam rangka investasi, misalnya pembelian Reksadana pendapatan tetap dan pembelian surat berharga; dan
 - e. penyaluran dan penghimpunan dana dalam rangka pengelolaan likuiditas, antara lain penempatan antar Bank dan penerimaan pinjaman antar Bank.
3. Produk atau aktivitas baru yang wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir A.4 adalah produk atau aktivitas yang bukan merupakan cakupan produk atau aktivitas dasar dan/atau memiliki risiko serta kompleksitas yang tinggi, antara lain meliputi:

a. penghimpunan ...

- a. penghimpunan dana berupa penerbitan surat utang, surat utang yang memiliki fitur ekuitas dan sekuritisasi aset;
 - b. aktivitas *treasury* berupa penerbitan derivatif kompleks, *structured product* atau *credit derivative*;
 - c. keagenan dan kerjasama berupa aktivitas *bancassurance* dan reksadana;
 - d. kegiatan sistem pembayaran antara lain berupa penyelenggara kliring, penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan penyelenggara uang elektronik (*E-Money*), *Phone Banking*, *SMS Banking*, *Mobile Banking* dan *Internet Banking*; dan
 - e. jasa atau layanan lain seperti kustodian, wali amanat dan *trust*.
4. Rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran III huruf A, yang paling kurang memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:
- a. jenis dan deskripsi umum produk atau aktivitas baru;
 - b. waktu penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru;
 - c. tujuan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru;
 - d. keterkaitan produk atau aktivitas baru dengan strategi bisnis Bank;
 - e. risiko atas penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan
 - f. mitigasi risiko atas penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru.

5. Dalam rangka penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas yang wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia, Bank mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru kepada Bank Indonesia yang disertai dengan dokumen pendukung yang paling kurang memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:
 - a. informasi umum mengenai produk atau aktivitas baru meliputi antara lain nama produk atau jenis aktivitas, rencana waktu penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas, target pasar dan/atau nasabah, rencana atau target nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun pertama, informasi mengenai skim atau fitur produk yang akan diterbitkan atau penjelasan mengenai aktivitas yang akan dilaksanakan;
 - b. manfaat dan biaya bagi Bank;
 - c. manfaat dan risiko bagi nasabah;
 - d. prosedur pelaksanaan (*standard operating procedures/SOP*), organisasi dan kewenangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
 - e. rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT);
 - f. identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru;
 - g. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas produk atau aktivitas baru;

h. dokumen ...

- h. dokumen atau konsep dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah yang terkait dengan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas yang meliputi antara lain perjanjian antara Bank dengan nasabah atau pihak lain, brosur, *leaflet*, prospektus, dan/atau formulir aplikasi;
- i. sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi tersebut dengan sistem informasi akuntansi Bank secara menyeluruh, dan/atau sistem pencatatan administrasi;
- j. dokumen yang menyatakan bahwa Bank telah memperoleh persetujuan atau izin dari otoritas yang berwenang, apabila aktivitas Bank dimaksud memerlukan persetujuan dari otoritas tersebut.
Dalam hal dokumen dimaksud belum diterbitkan, maka Bank dapat menyampaikan fotokopi bukti permohonan persetujuan atau izin kepada otoritas yang berwenang. Selanjutnya, setelah otoritas menerbitkan persetujuan atau izin, maka Bank wajib menyampaikannya kepada Bank Indonesia sebagai kelengkapan dokumen; dan
- k. kesiapan dan hasil uji coba Bank (apabila ada) atas produk atau aktivitas baru.

Informasi dan penjelasan dalam dokumen pendukung permohonan persetujuan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru berpedoman pada Lampiran III.B.

- 6. Permohonan persetujuan penerbitan produk atau aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada angka 5

disampaikan ...

disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru.

7. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
8. Dalam hal masih diperlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan berkenaan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan maka batas waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak Bank melengkapi dokumen dan/atau memberikan penjelasan yang diminta oleh Bank Indonesia.
9. Bank harus menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan oleh Bank Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan oleh Bank Indonesia, Bank tidak menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru maka persetujuan Bank Indonesia menjadi tidak berlaku.
10. Dalam hal persetujuan Bank Indonesia sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 9, namun Bank tetap akan menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru, maka Bank wajib menyampaikan kembali permohonan persetujuan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru kepada Bank Indonesia.
11. Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah produk diterbitkan atau aktivitas baru dilaksanakan.

Realisasi...

Realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru dihitung sejak tanggal produk atau aktivitas tersebut sudah dapat dibeli atau dimanfaatkan oleh nasabah.

Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling kurang memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:

- a. jenis dan nama produk atau aktivitas baru;
- b. tanggal penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan
- c. kesesuaian produk yang diterbitkan atau aktivitas baru yang dilaksanakan dengan produk atau aktivitas yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.

IV. PERLAKUAN TERHADAP BANK UMUM YANG MENGALAMI PENURUNAN MODAL INTI

- A. Bank yang mengalami penurunan Modal Inti sehingga menjadi tidak sesuai dengan persyaratan Modal Inti Minimum sesuai BUKU Bank selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, wajib menyampaikan:
 1. rencana tindak (*action plan*) dalam rangka pemenuhan persyaratan Modal Inti sesuai BUKU Bank; atau
 2. rencana tindak dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan BUKU Bank.
- B. Rencana tindak pemenuhan Modal Inti sesuai BUKU Bank paling kurang menguraikan:
 1. penyebab penurunan Modal Inti;
 2. mekanisme dan tahapan pemenuhan Modal Inti; dan
 3. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Bank Indonesia.
- C. Rencana tindak penyesuaian Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan BUKU Bank paling kurang menguraikan:

1. produk ...

1. produk dan/atau aktivitas yang harus dihentikan serta nilai nominal (*outstanding*) dan sisa jangka waktu terlama untuk produk atau aktivitas yang wajib dihentikan;
 2. rencana waktu penyelesaian akhir produk dan/atau aktivitas yang tidak sesuai;
 3. rencana komunikasi atau pemberitahuan kepada nasabah atau *stakeholders* mengenai penghentian produk dan/atau aktivitas;
 4. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Bank Indonesia.
- D. Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf B atau huruf C wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama pada bulan keempat sejak terjadinya penurunan Modal Inti sehingga menyebabkan tidak sesuai dengan persyaratan Modal Inti sesuai BUKU Bank, dengan alamat sebagai berikut:
1. Departemen Pengawasan Bank, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- E. Bank wajib menyelesaikan rencana tindak pemenuhan Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam huruf B paling lama 1 (satu) tahun sejak rencana tindak disetujui oleh Bank Indonesia.
- F. Bank yang tidak mampu memenuhi rencana tindak pemenuhan Modal Inti dalam waktu 1 (satu) tahun sejak rencana tindak disetujui oleh Bank Indonesia wajib menyampaikan rencana tindak penyesuaian Kegiatan Usaha

yang ...

yang tidak sesuai dengan BUKU Bank sebagaimana dimaksud pada huruf C.

- G. Bank wajib menyelesaikan rencana tindak penyesuaian Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C sampai dengan berakhirnya sisa jangka waktu perjanjian produk dan/atau aktivitas yang tidak sesuai dengan BUKU Bank. Dalam hal sisa jangka waktu perjanjian produk dan/atau aktivitas lebih dari 3 (tiga) tahun, Bank wajib menyelesaikan penghentian produk atau aktivitas dimaksud paling lama 3 (tiga) tahun sejak rencana tindak disetujui oleh Bank Indonesia.
- H. Bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan atas rencana tindak pemenuhan persyaratan Modal Inti sesuai BUKU yang diajukan kepada Bank Indonesia maka:
 - 1. Bank tetap dapat melaksanakan Kegiatan Usaha yang telah dilakukan meskipun tidak sesuai dengan cakupan Kegiatan Usaha yang diperkenankan pada BUKU Bank, termasuk melakukan transaksi baru dengan nasabah, sepanjang memenuhi tahapan pemenuhan Modal Inti yang telah disetujui Bank Indonesia;
 - 2. Bank tidak diperkenankan melakukan transaksi baru dengan nasabah sampai dengan terpenuhinya Modal Inti minimum menurut BUKU, apabila terdapat pelanggaran terhadap tahapan pemenuhan Modal Inti yang telah disetujui Bank Indonesia.
- I. Bank yang mengajukan rencana tindak penyesuaian Kegiatan Usaha dilarang menawarkan, menjual dan/atau melakukan perjanjian atau transaksi baru atas produk dan/atau aktivitas yang harus dihentikan sejak bulan keempat sejak terjadinya penurunan Modal Inti sehingga menyebabkan tidak

sesuai ...

sesuai dengan persyaratan Modal Inti berdasarkan BUKU Bank.

- J. Ketentuan dalam huruf A tidak berlaku untuk Bank yang mengalami penurunan Modal Inti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut termasuk Bank dalam penanganan atau penyelamatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), apabila mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan Kegiatan Usaha tertentu dengan pertimbangan stabilitas sistem keuangan dan/atau mendorong perkembangan perekonomian nasional.

V. TINDAK LANJUT PENGAWASAN

- A. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas dalam hal di kemudian hari berdasarkan evaluasi Bank Indonesia:

1. Produk yang diterbitkan atau aktivitas yang dilaksanakan:
 - a. tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk atau aktivitas yang diajukan kepada Bank Indonesia;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank;
 - c. berpotensi meningkatkan risiko hukum atau reputasi Bank secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah; dan/atau
 - d. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas produk yang diterbitkan atau aktivitas yang dilaksanakan.

Penghentian tersebut dapat bersifat sementara maupun permanen berdasarkan penilaian Bank Indonesia atas penyimpangan yang terjadi.

- B. Dalam hal Bank diperintahkan untuk menghentikan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf A maka:
 - 1. Bank wajib segera menghentikan penawaran, penjualan dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas produk atau aktivitas yang wajib dihentikan; dan
 - 2. Bank menyampaikan rencana tindak kepada Bank Indonesia atas penyelesaian kewajiban kepada nasabah terkait produk yang telah diterbitkan atau aktivitas yang telah dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak Bank diperintahkan untuk menghentikan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas.

VI. LAIN-LAIN

- A. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas produk atau aktivitas tertentu, Bank Indonesia akan mempertimbangkan kepentingan nasional terkait dengan dampak penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas antara lain untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan/atau mendorong perkembangan perekonomian nasional termasuk untuk penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas Bank dalam penanganan atau penyelamatan LPS.
- B. Bank dilarang untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas yang belum mendapatkan persetujuan Bank Indonesia dan/atau tidak tercatat dalam pembukuan atau administrasi Bank.
- C. Dalam hal penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas Bank telah diatur secara khusus dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas

lainnya ...

lainnya seperti ketentuan mengenai *structured product*, agen penjual SBN, agen penjual reksadana, aktivitas *bancassurance*, penitipan dengan pengelolaan (*trust*), pelaksana sistem pembayaran, penyediaan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan penggunaan teknologi informasi maka penerbitan produk atau aktivitas dimaksud mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan otoritas lain yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut.

- D. Lampiran I sampai dengan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VII. PERALIHAN

- A. Penentuan BUKU Bank berdasarkan Modal Inti, untuk pertama kali didasarkan pada posisi Modal Inti Bank pada akhir bulan Desember 2012.
- B. Bagi Bank yang sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini telah melakukan Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan BUKU, wajib menyampaikan rencana tindak pemenuhan Modal Inti atau rencana tindak penyesuaian Kegiatan Usaha kepada Bank Indonesia.
- C. Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf B, wajib disampaikan oleh Bank yang tidak mampu memenuhi persyaratan Modal Inti minimum sesuai BUKU sampai dengan akhir bulan Maret 2013.
- D. Ketentuan dalam huruf B tidak berlaku bagi Bank yang sampai dengan akhir bulan Maret 2013 telah mampu memenuhi persyaratan Modal Inti minimum berdasarkan BUKU. Namun Bank wajib menyampaikan laporan dan bukti pendukung pemenuhan Modal Inti minimum kepada

pengawas ...

pengawas Bank yang bersangkutan sebagai dasar penyesuaian BUKU Bank.

E. Rencana tindak pemenuhan Modal Inti paling kurang memuat:

1. sumber, jumlah dan mekanisme penambahan Modal Inti, seperti penambahan modal melalui investor yang telah ada (*existing*), investor strategis, atau *merger* dan konsolidasi;
2. komposisi pemegang saham Bank setelah penambahan Modal Inti;
3. tahapan pemenuhan Modal Inti sampai dengan persyaratan Modal Inti minimum sesuai BUKU Bank terpenuhi; dan
4. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Bank Indonesia terkait dengan rencana penambahan Modal Inti Bank.

F. Rencana tindak penyesuaian Kegiatan Usaha paling kurang memuat:

1. produk dan/atau aktivitas yang harus dihentikan, nilai nominal (*outstanding*) dan sisa jangka waktu telampa produk atau aktivitas yang harus dihentikan atau disesuaikan dan/atau penyertaan modal yang harus disesuaikan karena melebihi batas maksimal penyertaan modal berdasarkan BUKU;
2. rencana waktu pengakhiran produk dan/atau aktivitas dan/atau penyesuaian penyertaan modal;
3. rencana komunikasi atau pemberitahuan kepada nasabah dan *stakeholders* mengenai penghentian produk dan/atau aktivitas; dan

4. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Bank Indonesia terkait penghentian produk atau aktivitas yang tidak sesuai dengan BUKU Bank dan/atau penyesuaian penyertaan modal.
- G. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada huruf B wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan Maret 2013, dengan alamat sebagai berikut:
1. Departemen Pengawasan Bank, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- H. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan evaluasi atas rencana tindak yang disampaikan oleh Bank.
- I. Berdasarkan persetujuan Bank Indonesia atas rencana tindak, Bank melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. melakukan revisi atas Rencana Bisnis Bank dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama pada akhir bulan Juni 2013.
 2. melakukan penambahan modal dan/atau menyesuaikan Kegiatan Usaha:
 - a. paling lambat akhir bulan Juni 2016; atau
 - b. paling lambat akhir bulan Juni 2018 bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 3. Bank yang mengajukan rencana tindak pemenuhan Modal Inti:
 - a. tetap ...

- a. tetap dapat melaksanakan Kegiatan Usaha yang telah dilakukan meskipun tidak sesuai dengan cakupan Kegiatan Usaha yang diperkenankan pada BUKU Bank termasuk melakukan transaksi baru dengan nasabah, sepanjang memenuhi tahapan pemenuhan Modal Inti yang telah disetujui Bank Indonesia;
 - b. tidak diperkenankan melakukan transaksi baru dengan nasabah sampai dengan terpenuhinya Modal Inti minimum menurut BUKU, apabila terdapat pelanggaran terhadap tahapan pemenuhan Modal Inti yang telah disetujui Bank Indonesia.
4. Bank yang mengajukan rencana penyesuaian Kegiatan Usaha dilarang menawarkan, menjual, dan/atau melakukan perjanjian atau transaksi baru atas produk dan/atau aktivitas yang harus dihentikan.
- J. Bagi Bank yang telah menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas yang berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia ini wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia, tetap dapat memelihara produk atau aktivitas tersebut tanpa harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia, sepanjang merupakan cakupan produk atau aktivitas yang diperkenankan menurut BUKU Bank.
- K. Ketentuan dalam huruf B tidak berlaku bagi Bank yang pada posisi akhir Desember 2012 tidak memenuhi persyaratan Modal Inti minimum sesuai BUKU namun mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk tetap dapat melakukan Kegiatan Usaha tertentu berdasarkan pertimbangan stabilitas sistem keuangan dan/atau mendorong perkembangan perekonomian nasional, termasuk Bank yang dalam penanganan atau penyelamatan LPS.

VIII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 perihal Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2013.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULYA E. SIREGAR

KEPALA DEPARTEMEN
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN